

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)

Nama OPD : KECAMATAN MANDALAJATI
 Nama PPID : YATI SRI SUMIATI, S.AP

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2		3	4	5	6
KEARSIPAN						
1	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan :					
	a. Dokumen Keuangan: (SPJ berikut lampirannya, Dokumen anggaran dan otorisasinya, dan surat pencairan anggaran)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17; dan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	selama masih berlaku	menghambat proses penegakan hukum	menyediakan data lengkap yang dilindungi	
	b. Memorandum/ surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17; dan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	selama masih berlaku	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	
BIDANG KEPENDUDUKAN						
1	Data Pribadi Penduduk	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I; UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2), dan (3)	Sampai terbitnya Keputusan Mendagri/ Gubernur/ Bupati/ Wali Kota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	
BIDANG KEPEGAWAIAN						
1	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
NIHIL						
BIDANG PEREKONOMIAN						
NIHIL						
BIDANG PEMERINTAHAN						
NIHIL						
BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI						
NIHIL						
BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL						
NIHIL						
BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA						
1	Hasil test Kemampuan Fisik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN						
NIHIL						
BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN						
NIHIL						
BIDANG KESEHATAN						
NIHIL						
BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
1	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/ kelurahan dan kelompok masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	
BIDANG KOMINFO						
NIHIL						
BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA						
NIHIL						
BIDANG KEUANGAN						

1	Dokumen Proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan huruf j	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	
2	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum di audit)	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah di audit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	
3	Kertas Kerja Pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	